



## Athih Rohaeti Dariah

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Unisba, Sekretaris Komite Perencana  
Pembangunan Jawa Barat

**K**ETIKA Ketua MPR RI bersilatuhur dengan *civitas academici* Unisba, Jumat, 17 Juni 2016, beliau mengutarakan kekhawatirannya terkait dengan kesenjangan di negeri ini. Saat ini 1% orang terkaya tanah air telah menguasai hingga 50,3% dari seluruh kekayaan yang ada di Indonesia. Indikator kesenjangan yang lebih spesifik yakni tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau koefisien *gini (gini ratio)* sejak tahun 2008 terus meningkat, dari 0,35 menjadi 0,4 pada September 2015. Dalam kamarnya pembangunan, meningkatnya kesenjangan menjadi hal aneh dari hasil pembangunan.

Jawa Barat ternyata termasuk provinsi yang memiliki koefisien *gini* di atas nasional sehingga Provinsi Jawa Barat (bersama dengan Papua Barat) menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi se-Indonesia sebagaimana pernah dibahas oleh penulis sebelumnya di "PR". Lebih memprihatinkan lagi, indikator pembangunan lainnya yakni kemiskinan dan pengangguran pun memburuk. Persentase penduduk miskin pada September 2014 sebesar 9,18%, Maret 2015 meningkat menjadi 9,53%, dan terus meningkat di bulan September 2015 menjadi 9,57%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPPT) Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 0,27% dari 8,45% pada Agustus 2014, menjadi 8,72% pada Agustus 2015.

Hasil penelitian penulis sebelumnya menunjukkan pendanaan sejalan dengan berlangsungnya proses pembangunan, tepatnya seiring dengan ter-

jadinya perubahan struktur ekonomi Jawa Barat yang tidak seimbang dengan perubahan struktur tenaga kerjanya. Sejak tahun 1994, ekonomi Jawa Barat mengalami pengeseran struktur ekonomi dari sektor jasa ke sektor industri pengolahan (33,05% terhadap total PDRB Jawa Barat). Sektor pertanian terus mengalami penurunan hingga ke angka 15,96% waktu itu. Namun mayoritas tenaga kerja masih bergelut di sektor pertanian yakni 36,08%, sementara di sektor dominan yakni sektor industri pengolahan hanya 16,02%. Keadiseimbangan tersebut terus berlangsung hingga tahun 2009. Baru tahun 2010 terjadi pergeseran dominasi anggarannya kerja ke sektor perdagangan menjadi 24,83%, sektor pertanian menurun mencapai 23,4% dan sektor industri pengolahan 20,9%. Tahun 2014 jumlah pekerja di sektor perdagangan semakin meningkat menjadi 25,62% seiring dengan kontribusi sektor ini semakin besar terhadap total PDRB Jawa Barat.

Dibandingkan dengan nasional yang hingga saat ini dominasi sektor industri pengolahan masih sekitar 21% terhadap total PDB nya, berarti Jawa Barat adalah daerah yang lebih cepat mengalami pengeseran struktur ekonominya. Hal ini tidak lepas dari tipologi pertumbuhan ekonominya yang bersifat pengayangan terhadap sektor modern yang ditunjukkan dengan tingginya pertumbuhan sektor industri pengolahan di awal proses industrialisasi yang berlangsung di Jawa Barat.

### Perbedaan produktivitas Kesenjangan antara domi-

nasi *input* dan *output* berdampak pada perbedaan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan antarsektor. Artinya, pekerja di sektor industri dan jasa cenderung memperoleh pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pekerja di sektor pertanian. Dari persamaan regresi yang pernah penulis buat, dilihat dari nilai hitung variabel produktivitas tenaga kerja sektor pertanian tidak signifikan memengaruhi *gini ratio*, tetapi tanda sesuai dugaan.

Produktivitas tenaga kerja sektor jasa memiliki tanda positif dengan angka elastisitas paling tinggi di antara produktivitas tenaga kerja sektor lainnya. Kenaikan produktivitas tenaga kerja sektor jasa sebesar 1% akan menaikkan *gini ratio* sebesar 0,17%. Artinya, semakin produktif tenaga kerja di sektor jasa semakin tinggi distribusi pendapatan di Jabar.

Sementara itu, kenaikan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan industri pengolahan dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan sekalipun responsnya rendah. Saat ini ekonomi Jawa Barat menuju dominasi sektor jasa-jasa, sehingga di khawatirkan kesenjangan semakin menjadi-jadi. Meskipun terdapat Hipotesis Kurva U-Terbal Kuznet bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi (dihindaki dengan besaran PDR per kapita), distribusi pendapatan cenderung memburuk namun pada tahap selanjutnya membaik, ternyata kesederhanaan itu belum tampak untuk kasus Jabar.

### Langkah ke depan?

Upaya mengurangi kesenjangan di tengah-tengah kemiskinan dan pengangguran yang mengkhawatirkan perlu pemikiran komprehensif, perlu langkah-langkah yang terstruktur dan orientasi hasil jangka panjang. Artinya jangan dikaitkan dengan targetan jangka menengah bahkan pen-

dek terkait masa kepemimpinan. Dalam pandangan Tolan (2011) ketimpangan dapat dikurangi secara bertahap melalui kebijakan yang dilaksanakan dengan baik dalam mempromosikan pertumbuhan yang berpihak kepada orang miskin sepanjang waktu. Yang harus dirancang dan diwujudkan adalah karakter pertumbuhan ekonomi yang memberikan keberpihakan pada masyarakat miskin. Karakter dalam hal ini adalah cara menciptakan, siapa yang bertanggung jawab sektor yang diprioritaskan, pengaturannya lembaga yang akan dirancang dan ditekankan, yang akan menentukan sejauhmana pertumbuhan ekonomi meningkatkan standar hidup masyarakat miskin.

Menuju pertumbuhan yang berpihak kepada orang miskin sepanjang waktu, penulis mengusulkan hal-hal berikut ini. Pertama terkait siapa yang berpartisipasi di sektor-sektor yang diprioritaskan. Pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi beriesikan pertumbuhan setiap sektor yang mencakup 17 kategori lapangan usaha. Pertumbuhan berlangsung di perdesaan dan perkotaan. Dalam tahap ini seyogianya dapat teridentifikasi unit-unit usaha yang terlibat dalam penciptaan nilai tambah di setiap lapangan usaha, baik jaman sekarang maupun di masa-masa berikutnya. Untuk mengkomodasi partisipasi penduduk miskin, tampanya sektor pertanian dan berbagai sektor informal yang harus menjadi perhatian. Prioritas sektor pertanian diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin perdesaan yang mencapai 1.779.314 jiwa (September, 2015). Prioritas pembangunan sektor informal di industri mikro kecil dan perdesaan diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di luar di perkotaan yang di posisi September 2015 mencapai 2.706.520 jiwa.



tol  
PEMERINTAH ambil  
alih proyek tol mang-  
krak.  
- Dari pada mubazir.

pkl  
LIMA titik PKL di  
keat.  
- Kade aya nu "moncor".

bodong  
ADA sertifikat bo-  
dong di PPDB.  
- Sugan teu udel uwung-  
kul nu bodong.

Si Habajan

Kedua, berkaitan dengan pengaturan kelembagaan apa yang dirancang dan ditekankan, pemerintah daerah dapat menyiapkan kerangka regulasi khusus tentang pola pertumbuhan ekonomi pro masyarakat miskin. Selain itu, fokus yang bisa digarap adalah optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di antaranya koperasi. Dalam perjalanan, upaya optimalisasi LKM harus menjangkau ke nasabahnya bahwasanya masyarakat miskin yang akan dibayarkan perlu pendampingan secara berkelanjutan.

Dalam konteks inilah hal yang ketiga berkaitan dengan cara menciptakan, bagaimana potensi yang ada di Jabar dapat disinergikan. Salah satunya adalah peran kampus. Jumlah perguruan tinggi di Jawa Barat sekitar 339 buah dapat menjadi mitra untuk menyelesaikan pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin. Dosen dan mahasiswa turut mendampingi LKM dan usaha mikro yang melibatkan masyarakat miskin. Hari Koperasi pada 12 Juli mendatang dapat menjadi momentum membangun gerakan kampus untuk upaya koperasi.\*\*\*